

POJOK: KRITIK “JURUS KEPITING” PERS INDONESIA

Dadang S. Anshori

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang penggunaan bahasa kritik dan makna kritik yang dipakai para jurnalis (wartawan) dalam menyampaikan kritik sosial melalui rubrik yang dinamai pojok. Pada umumnya, tanggapan atau “suara redaktur” atas persoalan dan fenomena sosial dituangkan dalam tiga bentuk rubrik, yakni tajuk, karikatur, dan pojok. Namun demikian, dalam banyak teori pers, sesungguhnya setiap pilihan berita (*news*), opini (*view*), dan penempatan posisi keduanya merupakan sebuah “perwakilan” aspirasi para jurnalis. Dengan bahasa lain, jurnalis (wartawan) melakukan “politisasi” atau *agenda setting* dalam menentukan sebuah berita.

Data tulisan ini diambil dari tiga koran, *HU Kompas*, *HU Republika*, dan *HU Pikiran Rakyat* selama 6 bulan, 1 Januari s.d. 30 Juni 1997, tentang pojok pemilu 1997. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kritis serta linguistik (struktural) diperoleh beberapa hasil penelitian. Pertama, setiap koran memiliki gaya (*style*) tersendiri dalam melakukan kritik. Demikian pula, penggunaan bahasa masing-masing koran berbeda. Kedua, sebagian besar pojok termasuk dalam katagori baik.. Tingkatan kualitatif ini ditentukan oleh visi dan keberanian media massa dalam menyampaikan kritik di samping kualitas jurnalis (wartawan itu sendiri) dalam “mengolah” bahasa. Ketiga,. pojok yang baik (kritis) dibentuk melalui pola komentar kritik. Keempat, Berdasarkan perbandingan ketiga koran, *HU Republika* lebih banyak menggunakan pola komentar kritik dibandingkan *HU Kompas* dan *HU Pikiran Rakyat*. Kelima, pojok adalah cara paling aman yang dilakukan pers dalam melakukan kritik sosial.

I. PENDAHULUAN

Sebagai alat komunikasi, bahasa tidak hanya berkaitan dengan struktur bahasa (paradigma struktural), namun berkaitan pula dengan konteks (tujuan, situasi, ragam) berbahasa. Perhatian terhadap masalah konteks ini diwujudkan dalam pengembangan ilmu-ilmu baru sebagai cabang dari linguistik, seperti sosiolinguistik (sosial-linguistik), psikolinguistik (psikologi-linguistik), pragmatik, sosiopragmatik dll. Dalam pragmatik, kini berkembang pragmatik kontinental yang mewakili Linguistik Fungsional dan pragmatik Anglo-Amerika yang dikelompokkan dalam kajian Linguistik Formal (Gunarwan, 1996). Cabang-cabang ilmu tersebut mewakili aspirasi kajian bahasa dalam konteks yang tidak bisa diukur dalam takaran struktur (linguistik formal). Untuk membongkar makna-makna dibalik simbol dan lambang, diperlukan pendekatan sosial, psikologis, dan bahkan politik. Melalui cabang-cabang ilmu inilah, linguistik bertemu dengan teori-teori ilmu komunikasi. Untuk itulah tidak heran apabila seorang linguist juga seorang pakar komunikasi (Rakhmat, 1994).

Di samping pendekatan linguistik fungsional, secara khusus tulisan ini didekati dengan metode kritis dalam komunikasi. Aliran kritis merupakan “perlawanan aliran empiris” (bisa disebut subjektif versus objektif) yang berkembang di Jerman, sehingga aliran ini disebut Mazhab Frankfurt. Pendekatan ini merupakan suatu *kritik teori* terhadap teori-teori empiris yang sudah terlebih dahulu mapan. Menurut Abar (1998) ada empat

karakter (ciri) aliran kritis, yakni 1) Menekankan pada unsur-unsur filosofis komunikasi; 2) Aliran kritis melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi manusia; 3) Aliran kritis lebih memusatkan perhatiannya pada siapa yang mengendalikan komunikasi; 4) Aliran kritis sangat yakin pada teori komunikasi manusia, khususnya teori-teori komunikasi massa, tidak mungkin akan dapat menjelaskan realitas secara utuh dan kritis apabila ia mengabaikan teori-teori tentang masyarakat. Oleh karena itu, teori komunikasi massa harus berdampingan dengan teori-teori sosial.

Menurut Keraf (1980:4) sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan gagasan kita, dan memungkinkan kita mendapatkan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan, dan mengarahkan masa depan kita. Ia juga memungkinkan manusia menganalisis masa lampaunya untuk memetik hasil-hasil yang berguna bagi masa kini dan masa yang akan datang. Di samping sebagai alat komunikasi, alat integrasi, dan alat adaptasi sosial, bahasa juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial.

Keterkaitan bahasa dengan politik disebutkan Pabotinggi (1993). Menurutnya kita tidak mungkin berbicara tanpa memilih posisi atau sikap tertentu, tanpa menyatakan perasaan tertentu. Berbicara dilakukan dalam rangka berkomunikasi, berbicara tanpa sikap dan perasaan berarti tak berbicara sama sekali. Berkata –lisan maupun tertulis— adalah menyampaikan pikiran/perasaan. Pikiran/perasaan yang secara relatif konsisten, kita nyatakan atas masalah-masalah penting dalam kehidupan bersama. Itulah politik kita.

Pendapat senada diungkapkan Dahana (1996) bahwa bahasa ternyata telah diposisikan tak lebih dari sebuah siasat, taktik atau strategi, sebagaimana kita menerapkan sebuah sistem organisasi atau teknik manajemen tertentu. Kualitas dan kapasitas awalnya sebagai “pintu pemahaman pertama” pada kenyataannya telah digeser oleh kekuatan teknologi modern, yang pada mulanya hanya sebagai fungsi tiruan. Bahasa kini adalah teknologi yang dengan kreativitas dari *vested interest* mampu dimodifikasi untuk melayani sebuah tujuan (dari golongan) tertentu. Ia tidak lagi sebuah kebenaran (sebagaimana keyakinan ini diturunkan oleh peradaban mantra-mistik), namun lebih dari sesuatu yang dibenarkan.

Pers sebagai sebuah realitas komunikasi dan realitas bahasa merupakan dua hal menarik untuk dikaji. Namun sebagaimana paradigma Linguistik Fungsional, metode kritis lebih memberikan warna kualitatif dan pada gilirannya akan menampilkan sisi dan kedalaman subjektivitas dalam menganalisis fakta. Pojok yang menjadi korpus data tulisan ini sulit (bahkan hampir tidak mungkin) didekati secara Linguistik Formal. Sebagai sebuah bentuk tanggapan (baca: kritik) redaksi, penggalan kalimat yang sangat pendek, pojok telah menampilkan sisi yang khas dalam sistem jurnalistik Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya akan dikaji dua hal pokok, yakni 1) Bagaimana kualitas pojok menampilkan diri sebagai media kritik sosial?; 2) Bagaimana warna (ragam) bahasa pojok sebagai simbol dari penyampaian kritik sosial tersebut? Untuk pada gilirannya, jawaban dari kedua pertanyaan di atas akan dikomparasikan di antara ketiga pers (koran) yang menjadi korpus data tulisan ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kritik: Pengertian, Sikap, Teknik Penyampaian, dan Bentuk

Kritik lebih berkonotasi negatif. Dalam KBBI (1989:466) disebutkan arti kritik sebagai kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik-buruk suatu hasil karya. Kritik, dalam tradisi pers sering dilontarkan terhadap masalah sosial. Istilah sosial dalam KBBI (1989:855) disebutkan dalam dua pengertian, yaitu 1) berkenaan dengan masyarakat; 2) suka memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian, tidak heran apabila kritik sosial pers sering dianggap sebagai ancaman atau perlawanan pers terhadap berbagai pihak. Kritik secara praksis bahkan mengalahkan uraian atau pertimbangan baik-buruk. Orang yang dikritik sangat jarang memperhatikan penjelasan (argumentasi) dari sebuah kritik.

Susetiawan (1997:27) menyebutkan bahwa kritik sosial atau konflik tidak perlu dipahami sebagai tindakan yang akan membuat proses disintegrasi tetapi dapat memberi kontribusi terhadap harmonisasi sosial. Dalam hal ini stabilitas atau harmoni adalah keseimbangan dari kehidupan konflik yang semua pihak mendapatkan imbalan yang sama. Pada tingkat ini kritik sosial harus dilakukan secara transparan dan jelas yang berfungsi sebagai kontrol sosial.

Pendapat sejenis disampaikan Astrid S. Susanto (1977) bahwa suatu kritik adalah penilaian ilmiah ataupun pengujian terhadap situasi masyarakat pada suatu saat. Kritik sosial akan mengedepankan bukti-bukti objektif dan bobot ilmiah terhadap masalah yang terjadi. Saat ini kritik sosial semakin diperlukan mengingat bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin maju dan memerlukan data-data yang akurat terhadap sebuah masalah.

Demikian pula Faruk (1997:32) menuliskan pengertian kritis dalam beberapa perspektif seperti di bawah ini:

“Dalam pengertian Kantian, kritis berarti kemampuan subjek untuk melepaskan diri dan mengambil jarak dari objek. Dalam pengertian Hegel kritik berarti kemampuan subjek untuk membangun sintesis dengan menyatakan dirinya dalam objek. Dalam pengertian Maarx, hal ini dipahami sebagai kemampuan manusia merealisasikan dirinya dalam objek dengan mengubah objek itu. Dalam pengertian teori mazhab Frankfurt, kritis berarti kemampuan penyadaran diri manusia dari kekuatan tertentu sehingga gilirannya manusia itu mampu melakukan perlawanan dan perubahan atasnya.”

Dalam kritik hal yang dianggap penting adalah proses berpikir ilmiah yang harus dilakukan seorang kritikus. Demikian pula pendekatan (metode) ilmiah yang digunakan. Pada hakikatnya sebuah kritik sosial menggunakan metode berpikir ilmiah, yakni menemukan masalah, mencari data, membuat hipotesis, mengolah data untuk pembuktiaan masalah, analisis dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh.

Kritik dalam pikiran Naomi (1996:211) adalah pengujian terhadap situasi masyarakat dengan tolok ukur suatu situasi ideal dan perilaku ideal. Menurutnya kritik atau kontrol sosial menitikberatkan pada apa yang oleh kritikus dianggap benar sedangkan kontrol sosial membenarkan pendapat kolektif. Selanjutnya Naomi (1998:213) menyebutkan:

“Setiap kritik adalah pisau, dan pandangan tentang pisau berbeda-beda. Pisau mencacah daging dan menggorok sayur-sayuran. Ini “merusak”. Tetapi pisau memungkinkan piring-piring dipenuhi makanan, yang tanpa itu manusia punah. Ini “membangun”. Tergantung cara memandang dan apa tujuan kritiknya. Bahkan

orang yang paling “subversif” pun harus mengakui bahwa kritik bisa salah bahan, bisa salah sasaran, bisa “jahat”, bisa “haus darah”.

Dengan demikian, kritik bukan didasarkan atas sikap suka atau tidak suka terhadap masalah atau objek. Kritik justru hadir sebagai evaluasi untuk kepentingan perbaikan di masa mendatang. Masyarakat yang dinamis akan melahirkan persoalan-persoalan yang harus disikapi secara kritis. Maka dengan segala kearifannya setiap orang harus menyelesaikan setiap persoalannya. Preposisi ini tidak sama dengan istilah “kritik membangun” yang didominasi oleh kepentingan kekuasaan. Kritis tentu lahir dari sikap masyarakat yang objektif, bertanggung jawab, dan demokratis.

Oleh karena itu, kritik menurut Alwi Dahlan (1977) sangat erat kaitannya dengan sistem komunikasi yang berlalu di suatu negara. Sistem timbal balik akan memungkinkan seseorang menerima kritik dari orang lain dengan lapang dada. Kritik bukan semata-mata untuk memojokkan orang lain. Kritik yang baik akan menggunakan prosedur yang benar. Kritik akan tetap berhadapan realitas budaya sebuah masyarakat. Barat menganggap kritik sebagai hal biasa, namun pejabat kita memandang kritik sebagai masalah negatif. Maka cara mengkritik tetap harus diperhatikan seorang kritikus.

Masyarakat yang berbudaya feodal relatif tertutup atas kritik. Bagi mereka kritik adalah ancaman. Masyarakat yang seperti ini cenderung masih menempatkan struktur sosial dalam masyarakatnya. Pandangan negatif terhadap kritik disebabkan sikap apriori terhadap pikiran orang lain sehingga merasa benar sendiri. Demikian pula sikap tidak menerima perbedaan akan menyebabkan seseorang tertutup pada pikiran dan pendapat orang lain.

Sebaliknya, masyarakat moden adalah masyarakat yang terbuka. Sekat-sekat feodal hilang oleh kemajuan dan pergesekan budaya. Setiap orang berkompentensi untuk maju dan kemajuan diraih bukan tanpa kritik. Masyarakat modern harus mengembangkan sistem komunikasi multiarah. Negara bukan lagi komponen yang mendominasi setiap bentuk komunikasi. Saat ini hampir setiap kebijakan harus melewati proses kritik masyarakat. Kritik tersebut bukan berarti menentang pemerintah, namun menguji sisi baik dan buruk setiap kebijakan.

Demikian pula dalam dunia pers dan akademik. Kritik adalah makanan harian. Komunikasi akademik adalah komunikasi yang objektif dan ilmiah. Kritik dilakukan dalam rangka membuktikan kebenaran hipotesis. Pers yang secara tersurat berperan melakukan kritik sosial akan melakukannya terhadap setiap persoalan dan fenomena sosial yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, pers yang mementingkan aspek bisnis akan kehilangan “daya sngat” kritiknya. Pers bisnis hanya akan menjadi wakil kepentingan para kapitalis. Oleh karena itu, hanya pers yang netral dan menjaga objektivitas yang akan mampu melakukan kritik secara baik dan objektif.

Dalam kritik, teknik penyampaian merupakan hal penting yang tidak bisa dikesampingkan bahkan menentukan keberterimaan kritik tersebut. Banyak orang yang beralasan bahwa dirinya bukan tidak senang dikritik, namun keberatan dengan cara mengkritik yang dianggap kurang etis. Kritik media tentu ada yang langsung ada yang tidak langsung. Media massa bisa melakukan kritik secara langsung melalui pemberitaan atau tulisan di tajuk (editorial). Masyarakat yang berkeberatan dengan kritik bisa mengajukan hak jawab, somasi, atau mengajukan media tersebut ke pengadilan. Pada zaman Orde Baru, hanya media yang SIUUP-nya siap dicabut, yang melakukan secara tajam dan keras. Pada umumnya, para jurnalis menahan diri atau mencari jalan lain untuk

melakukan kritik tanpa harus mengorbankan korannya. Oleh karena itu, berkembanglah istilah kritik yang membangun atau kritik yang sehat. Istilah ini sesungguhnya lebih mengacu pada model kritik yang disesuaikan dengan penguasa, yang sesungguhnya bukan termasuk kritik.

Urgensi Kritik Media Massa

Kritik sosial akan lebih efektif apabila disampaikan melalui lembaga penyalur kritik. Saat ini banyak lembaga yang menampung aspirasi masyarakat maupun perorangan. Pers adalah salah satu lembaga yang ikut andil dalam menyampaikan kritik sosial kepada masyarakat dan penguasa.

Menurut Ahmad Zaini Abar (1997:50) bagi pers menyampaikan kritik adalah salah satu cara menjalankan salah satu fungsi normatifnya, yakni sebagai alat kontrol sosial. Selain itu bermakna sebagai cara bagaimana pers menyalurkan aspirasi sosial, aspirasi masyarakat. Demikian pula, kritik sosial, bagi pers merupakan satu cara bagaimana pers memposisikan diri sebagai wahana katarsis sosial, sarana penglepasan kegelisahan, keprihatinan, dan kemarahan rakyat.

Gaya kritik surat kabar Indonesia, menurut James L. Peacock sebagaimana dikutip Aly (1986:8) mirip pewayangan, yaitu hanya bayangan yang menjadi kenyataan. Melontarkan kritik memerlukan bakat tersendiri, bagaimana mengangkat sesuatu kasus ke permukaan sehingga dia muncul menjadi isu masyarakat tanpa melukai hati yang dikritik. Seolah-olah yang dikritik bagian dari si pengkritik, ia tidak ditunjuk hidungnya, tetapi sang indra dibuat kembang kempis.

Menurut Rosihan Anwar, dalam melakukan kritik, banyak media yang melakukan “kritik keping” Ada saatnya tiarap dan ada saatnya menembak. Memang nasib pers pada zaman Orde Baru, nasib pers tidak lebih dari bagaimana menyiasati diri agar selamat dalam berbagai jepitan. Di saat kran keterbukaan dibuka lebar-lebar, pers berhamburan dengan agenda-agenda yang diarsipkannya. Namun, di saat keterbukaan ini menyempit, dia pun harus hati-hati dari sasaran kekuasaan.

Dalam media massa kritik yang paling aman rupanya disampaikan dalam bentuk humor. Dalam pojok dan karikatur, gaya humor sangat kentara. Humor terbagi menjadi tiga macam, yakni ironi, sinisme dan sarkasme (Naomi, 1996:245). Kritik di masa Orde Baru tidak keluar dari tiga gaya tersebut. Menurut James Danandjaya, humor bisa menjadi semacam katup pelepas. Humor tidak lagi sekadar “memproduksi” tertawa, tetapi membawa pemikiran tertentu yang lebih serius. Dalam tataran filosofis, humor merupakan media protes sosial yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Di samping itu, kritik humor lebih dapat menjamin keamanan kritikus sendiri.

Pers sebagai lembaga normatif kritik akan berhadapan dengan dua persoalan mendasar. Pertama, secara internal dia akan menghadapi dilematik antara idealisme atau bisnis media. Pers industri akan lebih mengembangkan bisnis daripada idealisme sehingga pers tidak lagi memposisikan diri sebagai katarsis sosial. Pers tidak lebih dari lembaga-lembaga bisnis lainnya di bidang informasi. Kedua, faktor eksternal, kekuasaan negara dan masyarakat sebagai objek kritik. Pers yang kritis acapkali mendapat hambatan bahkan serangan dari kekuasaan negara. Beberapa kasus pembreidelan sepanjang sejarah pers Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terciptanya sistem demokrasi dan jaminan bagi hak-hak pribadi warga

negara. Dengan alibi harmoni atau stabilitas negara, kepentingan-kepentingan di luar negara dengan mudah dipangkas dan tidak diberi tempat untuk tumbuh.

Pers juga harus menuai badai yang disebabkan kritik yang dilakukannya. Berbagai kasus seperti penyerbuan, pendudukan, bahkan pembunuhan para wartawannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia jurnalistik. Kasus terbunuhnya wartawan *Bernas*, M. Fuad Syafrudin, hingga kini tidak jelas penyelesaiannya. Beberapa tindak kekerasan wartawan Indonesia bisa dilihat sebagai berikut:

KASUS	TINDAKAN
1. Asisten Tatapraja memaki-maki wartawan <i>Republika</i> , Guntoro. Kejadian di ruang bawah Pemda Bekasi (Jum'at 2/2/96).	Dilaporkan ke polisi
2. Wartawan <i>Terbit</i> , Alfian, dianiaya oknum Satpam PO Sinar jaya. Satpam keberatan dengan liputan yang membuka terminal illegal.	PWI Jaya protes
3. Muhammad Sidiq (<i>Wawasan</i>), Budi Sardjono (<i>Yogya Post</i>), dan Agus Tjitrodirdjo (<i>Businis News</i>) dipukul oknum ABRI di Solo.	Wartawan protes dan akhirnya didamaikan
4. Bupati Polmas, Saad Pasilong, Sulsel mengusir empat wartawan yang hendak meminta penjelasan soal pembangunan pasar, Kamis (23/5). Mereka yang diusir adalah wartawan <i>Kompas</i> , <i>RCTI</i> , <i>Suara Karya</i> , dan <i>Tiras</i> .	Gubernur ZB Palaguna menyesalkan. Bupati kemudian minta maaf.
5. Wartawan <i>Bernas</i> , Fuad M. Syafrudin dianiaya orang tak dikenal di kediamannya hingga tewas.	Penyelidikan masih terus dilakukan

Sumber: Pusat Informasi *Kompas*, 2 Januari 1997

Pojok sebagai Jendela Pers

Pojok adalah salah satu rubrik yang ditempatkan atau diletakkan pada sudut kanan atas atau sudut kanan bawah, tetapi ada pula yang berposisi di bawah kiri atau kanan. Pojok ditulis oleh implikator surat kabar senior. Pojok diberi nama khusus, misalnya *Rehat (Republika)*, *Mang Usil (Kompas)*, *Mat Cawang (Sinar Harapan)*, *Si Kabayan (Pikiran Rakyat)* dan sebagainya (Natawidjaya, 1986:126).

Menurut Naomi (1996:287) pojok merupakan jendelanya sebuah penerbitan. Pojok memiliki dua karakteristik, pertama, umumnya tidak punya kesan serius. Hal ini ditandai dengan simbol nama penulisnya. Kedua, pojok bisa menjadi siapa saja di antara kita. Pojok memiliki kesan sebagai suara pinggiran atau arus bawah sebuah Koran sebab ruangnya yang kecil, kebiasaan guyonnya, dan tema-tema tidak penting yang kadang diangkatnya. Bahkan di beberapa Koran ia benar-benar "kaum pinggiran" karena diletakkan persis di tepi bawah halaman dan tidak ada satu orang pun yang membeli

koran hanya karena pojoknya –kecuali orang yang mempunyai tujuan tertentu, misalnya penelitian.

Menurut Makkah (1977:34) penamaan pojok tampaknya disebabkan oleh penempatan rubrik ini di halaman surat kabar. Ruang yang diberikan untuknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang diberikan pada tajuk rencana, berita ataupun artikel lainnya.

Pojok dengan tokohnya, seakan-akan seorang “tukang gong” yang suka “nyeletuk” dalam suatu pembicaraan ramai. Ia “nyeletuk” dari sudut ruangan, memancing perhatian. Omongannya sering nyelekit.

Pojok berfungsi untuk menyentil sebuah peristiwa, kejadian atau kebijakan yang dijalankan oleh orang-orang penting. Cara penyampaiannya dalam bahasa humor, ulasan, tanggapan, dan kritikan.

Pojok: Sebuah Bentuk Kritik Media Massa

Secara historis, perkembangan pers di Indonesia mengikuti periodisasi perjuangan bangsa Indonesia. Periode pertama pers Indonesia antara tahun 1940-1950. Masa itu pers kita disebut dengan pers perjuangan. Bangsa kita saat itu sedang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan-tangan penjajah. Periode kedua (1950-1965) disebut pers politik. Penamaan tersebut berkait erat dengan kondisi politik saat itu yang liberal. Kita digusarkan dengan peristiwa-peristiwa politik dengan jatuh bangunnya kabinet. Pers saat itu menjadi alat perjuangan politik oleh kelompok-kelompok politik sesuai dengan ideologi partainya. Ketiga (1960-an) dinamai pers Orde Baru. Pers memulai babak baru dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan yang dipelopori Orde Baru. Terakhir (1970-an) kita mengenal istilah pers pembangunan atau jurnalistik pembangunan. Konsep pers yang terakhir ini lebih mengembangkan sistem bisnis dan perusahaan. Pers menjadi alat hidup dan profesi, laiknya perusahan. Dalam dunia pers pembangunan sangat sulit ditemukan idealisme wartawan atau fungsi kontrol sosial secara memadai. Pada saat itu pula, pers mengalami persaingan ketat dengan teknologi informasi lainnya.

Dalam konteks kesejarahan pers Indonesia, pojok telah hadir menghiasi koran Indonesia sejak zaman Belanda. Pojok merupakan khas pers Indonesia. Kehadiran rubrik ini merupakan sarana untuk melakukan kritik. Pojok dalam posisi ini relatif lebih aman dibandingkan rubrik-rubrik lain dalam sebuah koran.

Pojok mencapai “puncak kejayaannya” pada masa Orde Lama. Edward Smith menyebut pojok sebagai cerminan liberalisme pers yang sempurna. Penyebutan itu lebih disebabkan oleh kebebasan kritik yang disampaikan pojok. Bahkan pojok menjadi “medan perang” yang ampuh antara berbagai kekuatan partai politik di masa Orde Lama. Pada tahun 1964 pernah terjadi “perang pojok” antara *Merdeka*, *Suluh Indonesia*, dan *Bintang Timur*. Masing-masing berperang sesuai dengan aliansi politiknya.

Pada awal Orde Lama, pojok sempat diberangus karena berbagai kritik tajam yang disampaikannya. Demikian pula pojok sering bernada mengadu domba dan menghantam kelompok lain. Hal ini terjadi karena selama ini nyaris tidak ada aturan “yang baik dan sopan” dalam penulisan pojok.

Dalam hal ini Makkah (1977:33) menulis:

“Pada saat kita memulai melengkapi kultur bangsa dengan mengenal media massa sebagai sarana komunikasi, surat kabar-surat kabar berbahasa Indonesia terbit di

zaman Belanda, senantiasa memuat tulisan pendek di satu sudut halamannya yang selama mendapat perhatian pembaca. Rubrik kecil di sudut yang mengandung kritik ini –yang boleh jadi tercipta untuk melawan kolonial—diteruskan pada zaman pendudukan Jepang, dan berlanjut hingga sekarang. Isinya senantiasa kritik. Kadang-kadang pedas, tempo-tempo halus tetapi menusuk. Rubrik dengan ciri sinis dan lucu ini, akhirnya lebih populer dengan sebutan pojok. Ia dianggap khas pers Indonesia. Bahwa ia mendapat perhatian pembaca, terbukti dengan lahirnya “memojoki” beberapa tahun yang silam, yang berarti “menuliskan di ruangan pojok”.

Dengan demikian, pojok dapat dikatakan sebagai perwujudan idealisme pers. Pers Indonesia menurut Herawati Diah (1997) bukan dunia kependuan dengan nyanyian di sini senang di sana senang. Jurnalisme yang “diayun ke sini dan ke sana masih tetap senang”. Itulah jurnalisme industrial yang berorientasi pada profit dan tidak peduli pada idealisme dan komitmen jurnalisme itu sendiri: pers bebas, masyarakat demokratis, dan penegakkan hak azasi manusia.

Pendapat senada disampaikan Ashadi Siregar (1993) bahwa bisnis pers akan semakin meningkat tetapi secara institusi sama sekali tidak, sebab jurnalisme kita ternyata tidak mampu menangkap secara total fakta yang ada dan tidak semua realitas menjadi informasi. Yang menjadi realitas justru diubah menjadi komoditi. Banyak informasi hanya menyentuh secara psikologis, tetapi tidak mengungkap realitas dalam berbagai dimensi.

Berkaitan dengan kritik pojok, penelitian Naomi (1996:229) yang membandingkan antara kritik pojok *Kompas* dengan pojok *Suara Karya* menarik untuk disimak.

VARIABEL PENELITIAN	KOMPAS	SUARA KARYA
Fungsi pojok	Kritik	Kritik
Bidang yang dikritik	Sosial budaya	Sosial budaya
Nada kritik politik	Netral	Kritis
Sasaran kritik	Masyarakat	Negara
Cara menyamakan kritik	Ironi dan humor	Humor

Sumber: Naomi. (1996). *Anjing Penjaga*. Jakarta: Gorong-Gorong Budaya.

Pojok: Ragam Bahasa Jurnalistik

Menurut penggolongan variasi bahasa, Chaer dan Agustina (1995:84) dari sudut pemakaian bahasa, ragam bahasa jurnalistik termasuk ragam sosiolek, yakni ragam bahasa yang dipakai pada suatu kelompok masyarakat dan profesi tertentu. Ragam jurnalistik juga bisa dikelompokkan ke dalam ragam berdasarkan aspek pemakaian bahasa secara fungsional atau profesi (Bawa: 1996:128).

Ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri yaitu bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami secara mudah; komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita yang tepat; dan ringkas karena keterbatasan ruang (dalam media cetak) dan keterbatasan waktu (dalam media elektronik). Dalam ragam bahasa jurnalistik awalan *me-* dan *di-* sering ditanggalkan, yang dalam penulisan berbahasa baku harus digunakan (Chaer dan Agustina, 1995:90-91).

Menurut Hassanudin (1992:50-55) ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri: 1) lugas, tidak ambigu, 2) sederhana, lazim dan umum, 3) singkat dan padat, 4) sistematis dalam penyajian, 5) berbahasa netral dan tidak memihak, 6) menarik, 7) kalimatnya pendek, 8) bentuk kalimatnya aktif, dan 9) penggunaan kalimat positif. Lugas artinya bahasa yang dipergunakan secara langsung pada sasaran makna yang ingin diungkapkan. Wartawan harus menghindari penggunaan bahasa yang kemungkinan akan mempunyai banyak tafsir. Sederhana berarti menggunakan bahasa yang sudah lazim dan diketahui masyarakat umum. Singkat dan padat disajikan karena media massa memiliki keterbatasan ruang. Sistematis berarti penyajiannya harus kronologis, menyajikan keteraturan peristiwa dalam penulisan berita. Berbahasa netral berarti demokratis, tidak membedakan sumber berita. Harus menarik karena surat kabar dikonsumsi untuk dibaca masyarakat. Kalimatnya pendek dimaksudkan agar pokok persoalan yang diungkapkan segera dapat dimengerti pembaca. Bentuk kalimatnya pasif agar berita lebih menarik dan terasa hidup. Penggunaan bahasa positif karena bahasa positif lebih diminati dibandingkan kalimat negatif.

Ragam bahasa pojok menurut Natawidjaja (1986:126) ditandai oleh sifat-sifat: 1) santai, 2) baku, 3) campuran bahasa baku dengan bahasa dialek atau bahasa daerah, 4) bahasa Betawi umumnya dipakai sebagai bahasa pojok dengan ciri dialek: *lho, rikuh, dong, cihuy, gimane*, dan sebagainya. Pojok dibentuk melalui empat pola, yakni kejadian-kritik, komentar-kritik, komentar-ulasan, dan kejadian-komentar.

Pojok sebagai karikatur yang melulu berisi kata-kata, pada hakikatnya lahir dengan sifat kritisnya, melalui gaya penyampaian yang menusuk, tetapi tak perlu mengundang orang naik darah. Inilah yang membuat pojok tidak mungkin ditulis sembarang orang, kecuali dia memiliki kemampuan bermain kata yang sinis dan humoris. Pojok dengan sifat lucunya, jelas tidak sama dengan tajuk rencana yang serius, baik yang informative maupun yang argumentative. Untuk memberikan informasi maupun atas pertanyaan “apa artinya itu?”, tajuk rencana ditulis panjang. Bahasa yang dipakai untuk berargumentasi membuat penulisan tajuk lebih meluas. Pojok tidak demikian adanya (Makkah, 1977:35).

Cara penulisan yang *tepo saliro* yang kadangkala mengambang itu ternyata lebih disukai atau lebih mengena dengan selera pejabat kita. Kritik gamlang dan blak-blakan sering ditafsirkan provokatif dan menghasut ketimbang apa yang disebut kritik konstruktif. Fenomena menarik bahwa bahasa yang bernada tenggang rasa sering kali lebih mengenai sasaran. Ini mungkin disebabkan budaya yang sangat alergi terhadap kritik terbuka, meskipun sangat diutamakan kejujuran dan lebih bisa menghayati bahasa madu yang beracun itu (Aly, 1986:8).

III. TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni 1997) pojok bertemakan pemilu 1997 yang dimuat oleh ketiga koran memiliki frekuensi yang berbeda-beda. *HU Kompas* memuat sebanyak 49 buah, *HU Republika* memuat sebanyak 26 buah dan *HU Pikiran Rakyat* memuat sebanyak 74 buah pojok. Dari jumlah pojok tersebut, untuk kepentingan penelitian ini diambil 30 pojok (masing-masing koran 10 buah) berdasarkan pertimbangan frekuensi pemuatan pojok, ragam bahasa, sasaran pojok, jenis tema pojok, serta pola pembentukannya (*purposif sampling*). Dari analisis data ditemukan beberapa temuan sebagai berikut.

Kritik pojok dengan tema pemilu memiliki sasaran kritik yang berbeda-beda. Perbedaan sasaran kritik berhubungan dengan *headline* berita koran tersebut. Oleh karena itu, pojok hanya mengangkat masalah-masalah besar dan aktual di samping memiliki daya tarik untuk dikritik (dikomentari). Sasaran kritik pojok sebagian besar (63,33%) diarahkan kepada partai politik (PPP, Golkar, PDI), sebanyak 20% diarahkan kepada kalangan birokrasi (pemerintah dan panitia LPU), dan sebanyak 16,67% diarahkan kepada masyarakat luas, termasuk di dalamnya pengamat politik yang banyak berkomentar tentang pemilu.

Dilihat dari perbandingan data ketiga koran, sasaran kritik dalam pojok *HU Kompas* lebih banyak (60%) kepada Parpol, kalangan birokrasi (20%) dan masyarakat luas (20%). Dalam pojok *HU Republika*, sasaran kritik terarah kepada Parpol (50%), kalangan birokrasi (20%) dan masyarakat luas (30%). Angka yang mencolok terdapat dalam pojok *HU Pikiran Rakyat*, sebanyak 80% (Parpol) dan kalangan birokrasi (20%).

Tabel 1
SASARAN KRITIK POJOK

KORAN	SASARAN KRITIK		
	PARPOL	BIROKRASI	MASYARAKAT
<i>KOMPAS</i>	60% (6)	20% (2)	20% (2)
<i>REPUBLIKA</i>	50% (5)	20% (2)	30% (3)
<i>PIKIRAN RAKYAT</i>	80% (8)	20% (2)	-
f (x)	63,33% (19)	20% (6)	16,67% (5)

Berdasarkan data di atas, pers lebih banyak melakukan kritik sebagai wujud kontrol sosial kepada Parpol. Hal ini menurut peneliti sangat tepat, karena parpol adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan pemilu. Namun demikian, sasaran kritik sangat bervariasi mengingat sistem pemilu 1997 masih belum demokratis. Pemilu 1997 banyak dimonopoli pihak birokrasi (kekuasaan legislatif), terbukti dengan posisi ketua LPU yang dijabat Mendagri. Kritik yang paling menarik dari pers tentang “perang warna” antara parpol yang satu dengan yang lainnya. Fakta menunjukkan, sebagaimana pemilu Orde Baru sebelumnya, birokrasi mulai Pusat hingga daerah diformat untuk kemenangan Golkar. Bahkan para bupati mengintruksikan agar pagar-pegar rumah dicat kuning sebagai bagian dari dukungannya kepada Golkar.

Contoh pojok yang melakukan kritik kepada birokrasi sebagai berikut:

Pemda DIY beri bantuan dana buat Parpol dan Golkar

Jangan buat beli cat lho, ya.... (Republika, 18 Januari 1997)

Kritik pojok pemilu memuat berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, baik sebelum maupun sesudah pemilu. Setiap hari, koran memuat pojok sesuai dengan bobot pemberitaan media tersebut. Secara umum materi pojok setiap hari berubah-ubah dan ditentukan oleh dinamika pemberitaan. Namun demikian, berdasarkan persoalan yang diangkat dalam pojok yang diteliti ditemukan bahwa materi penyimpangan dan kerusuhan pemilu yang hampir menghentikan pelaksanaan pemilu 1997 tampil dominan (26,67%). Penyimpangan dan kerusuhan tersebut berkaitan dengan “perang warna”, bentrokan fisik antar pengikut partai dan berbagai kegiatan politik yang mengindahkan etika politik. Materi pojok lainnya yang dominan adalah kampanye pemilu (23,33%). Isu yang paling mencolok adalah sekitar KKN yang oleh banyak pihak sudah

dianggap mendarah daging dalam perpolitikan Indonesia. Di samping itu terdapat materi tentang calon legislatif, PNS yang menjadi jurkam, hadirnya pengamat asing, bahkan kasus PDI yang hingga kini sering disebut “Sabtu Kelabu”, 27 Oktober 1997.

Contoh pojok tentang kampanye anti korupsi.

Jurkam: Golkar tak pernah ajari kadernya korupsi.

Soal itu mah sudah bisa sendiri. (Republika, 17 Mei 1997)

“Selain tak ada konglomerat yang menyumbang, kan bagi PPP tiada yang bisa dikorupsi.” Ujar Sekjen PPP Tosari Wijaya soal PPP mungkin tak penuh ikut kampanye karena kekurangan dana.

Emangnya yang lain bakal korupsi, Pak?(Kompas, 5 Januari 1997)

Berdasarkan klasifikasi kualitas kritik yang dicerminkan melalui bahasa kritik, ditemukan sebanyak 43% pojok memiliki kualitas kritik yang baik, 36,67% klasifikasi sedang, dan 20% berkualifikasi kurang baik. Apabila dilakukan komparasi di antara ketiga media, ditemukan data bahwa pojok *HU Kompas* sebanyak 30% baik (tajam), 70% dikategorikan sedang (biasa). Dalam *HU Republika* sebanyak 90% pojoknya berkategori baik (tajam), dan hanya 10% yang berkualitas sedang. *HU Pikiran Rakyat* menunjukkan bahwa pojoknya hanya 10% yang berkategori baik (tajam, 30% berkualitas sedang, dan 60% kurang baik. Kualitas ini ditentukan oleh ketajaman visi media dan keberanian redaktur dalam menyampaikan kritik. Media yang terlalu berhati-hati, pojoknya akan terasa kurang menarik dan kurang tajam.

Tabel 2
KATEGORI POJOK

KORAN	KATEGORI		
	BAIK (TAJAM)	SEDANG	KURANG BAIK (TIDAK TAJAM)
<i>KOMPAS</i>	30% (3)	70%(7)	-
<i>REPUBLIKA</i>	90% (9)	10% (1)	-
<i>PIKIRAN RAKYAT</i>	10% (1)	30% (3)	60% (6)
f (x)	43,33% (13)	36,67% (11)	20% (6)

Pojok-pojok berikut dapat dibandingkan tingkat ketajamannya.

Kampanye ketiga OPP (PPP, Golkar, PDI) menyepakati jadwal pelaksanaan kampanye pemilu 1997.

Kita tunggu ketaatan pada kesepakatan itu. (Pikiran Rakyat, 5 April 1997).

Ketua PWI: Insan pers tak perlu digiring masuk OPP tertentu

Tanpa digiring sudah masuk sendiri-sendiri (Republika, 20 Maret 1997)

Ketua MPR/DPR Wahono menyatakan, penyampaian aspirasi rakyat ke DPR cukup diwakilkan kepada beberapa orang saja.

Setuju Pak, tapi kalau datang dengan sedikit orang jangan disebut “oknum yang mengatasnamakan”. (Kompas, 19 April 1997).

Kritik pojok dibentuk dalam empat pola, yakni kejadian-kritik, komentar-kritik, komentar-ulasan, kejadian-komentar. Berdasarkan empat pola tersebut ditemukan data bahwa 46,67% pojok dibentuk dengan pola komentar-kritik, sebanyak 16,67% berpola komentar-ulasan, dan 10% berpola kejadian-komentar.

Dalam menyampaikan kritiknya, pojok *HU Kompas* menggunakan pola kejadian-kritik (50%) dan komentar-kritik (50%). *HU Republika* lebih banyak menggunakan pola komentar-kritik (70%) dan sisanya kejadian-kritik (30%). Angka yang agak berlainan ditemukan dalam pola pojok *HU Pikiran Rakyat*, yakni kejadian-ulasan (30%, komentar-ulasan (50%), serta komentar-kritik (20%).

Tabel 3
POLA PEMBENTUKAN

KORAN	POLA PEMBENTUKAN			
	KEJADIAN-KRITIK	KOMENTAR-KRITIK	KOMENTAR-ULASAN	KEJADIAN-KOMENTAR
<i>KOMPAS</i>	50% (5)	50% (5)	-	-
<i>REPUBLIKA</i>	30% (3)	70% (7)	-	-
<i>PIKIRAN RAKYAT</i>	-	20% (2)	50% (5)	30% (3)
f (x)	26,66% (8)	46,67% (14)	16,67% (5)	10% (3)

Pojok yang baik yang memiliki nilai humor yang tinggi. Namun demikian, data menunjukkan bahwa 60% pojok yang diteliti nilai humornya rendah (serius) dan hanya 40% yang memiliki nilai humor. Di antara ketiga koran, pojok *HU Republika* mengandung humor yang tinggi (80%), sementara kedua koran lainnya memiliki angka terbalik dengan *HU Republika*.

Setiap pojok memiliki kebakuan yang bervariasi. Sebanyak 60% pojok ditulis dengan bahasa baku, 6,67% ditulis dengan bahasa tidak baku, dan 33,33% ditulis dengan bahasa campuran. Di antara 3 koran yang diteliti, *HU Pikiran Rakyat* memiliki tingkat kebakuan yang tinggi, sementara *HU Republika* memiliki tingkat kebakuan yang rendah. Berdasarkan komparasi antara kebakuan dan ketajaman kritik dapat disimpulkan bahwa pojok yang ditulis baku cenderung kurang kritis, sebaliknya pojok kritis cenderung ditulis dalam kalimat yang tidak baku atau campuran.

Tabel 4
NILAI HUMOR DAN KEBAKUAN

KORAN	NILAI HUMOR		KEBAKUAN KALIMAT		
	HUMOR	TIDAK	BAKU	TIDAK	CAMPURAN
<i>KOMPAS</i>	20% (2)	80% (8)	70% (7)	-	30% (3)
<i>REPUBLIKA</i>	80% (8)	20% (2)	30% (3)	10% (1)	60% (6)
<i>PIKIRAN RAKYAT</i>	20% (2)	80% (8)	80% (8)	10% (1)	10% (1)
f (x)	40% (12)	60% (18)	60% (18)	6,67% (2)	33,33% (10)

Perhatikan pojok humor sebagaimana di bawah ini.

Waka DPW PPP Jateng: Kampanye satu meja di Jateng belum memungkinkan.

Hayooo... taplaknya warna apa...?! (Republika, 16 April 1997)

Pojok yang ditulis dengan kalimat baku seperti di bawah ini.

dinas

Mendagri?Ketua Umum Lembaga Pemilihan Umum meminta agar semua orsospol tidak menggunakan kendaraaamn dinas untuk melakukan kampanye.

Kecuali... bila plat nomor diganti dengan hitam? (Pikiran Rakyat, 3 Januari 1997).

V. KESIMPULAN

Pojok sebagai jendela pers dan simbol liberalisasi pers mempunyai peran kritik sosial yang sangat penting dalam menunjukkan keberpihakan dan sikap sebuah media. Kritik pojok disampaikan dalam ragam bahasa yang bervariasi. Ragam bahasa ini bahkan menentukan tingkat kritis sebuah pojok. Pojok yang kritis biasanya disampaikan dalam bahasa yang cenderung tidak baku, penuh gaya humor dan menggunakan kosakata campuran. Sebaliknya, pojok yang baku cenderung tidak menarik dan tidak kritis.

Tingkat kritis pojok ditentukan oleh visi dan keberanian media untuk mengungkapkan realitas sosial. Dalam konteks ini *HU Republika* memiliki pojok yang lebih kritis dibandingkan pojok *HU Kompas* dan *HU Pikiran Rakyat*. *HU Kompas* cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kritik sedangkan *HU Pikiran Rakyat* pojoknya di samping tidak tajam lebih terkesan asal bapak senang (ABS). Secara umum ketidakkritis media massa, termasuk dalam penulisan pojok, lebih disebabkan “ketakutan” pers terhadap badai yang akan diterima dari kritiknya tersebut, terutama pencabutan SIUUP. Sebagai sebuah koran nasional, *HU Kompas* lebih memperhatikan keselamatan masa depannya dibandingkan melakukan kontrol sosial secara ketat. *HU Pikiran Rakyat* lebih banyak berlindung dibalik “tradisi kesantunan” masyarakat Sunda yang berpola *caina herang laukna beunang*.

Sekalipun humor sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, dalam konteks kritik yang disajikan dalam pojok, para jurnalis pada umumnya masih belum mampu mengaktualisasikan humor dalam bahasa pojok. Masalahnya, humor yang menarik harus juga memiliki tingkat kritis yang tinggi. Menulis pojok yang penuh humor tetap membutuhkan keberanian dan daya kritis yang tinggi.

Secara umum, pers Indonesia masih menggunakan “jurus kepiting” dalam melakukan kritiknya. Para insan pers selalu mencari saat yang tepat kapan harus mengkritik dan kapan harus tiarap. Orde Baru telah melahirkan pers yang terkekang dan tak sanggup memerankan fungsi kontrol sosialnya. Bahkan bahasa kritik yang ada pun teralienasi kekuasaan negara yang masuk melalui regimentasi linguistik. Bahasa-bahasa kritik kemudian harus distandarisasi melalui sebuah sangkar “kritik membangun, kritik konstruktif, kritik yang sehat, dll.” yang sebenarnya lebih mencerminkan sikap dominasi kekuasaan terhadap rakyatnya.

Pojok dalam konteks pers yang terkekang ini sedikit bisa bernafas karena posisinya yang “terpojok” dan tidak mendapatkan perhatian banyak orang. Pojok telah menjelma menjadi “rubrik hiburan” bagi para pembaca koran. Oleh karena itu, pojok di zaman Orde Baru hampir tidak pernah mendapatkan hambatan sekeras apapun isinya. Hampir seluruh pemberangusan koran di zaman Orde Baru bukan disebabkan kritik yang disampaikan melalui pojok. Pojok masih dianggap “olok-olok” media terhadap berbagai pihak yang dikritiknya dan posisinya tetap aman. Namun demikian, pojok merupakan model jurnalisme sisa-sisa pemberangusan penguasa otoriterian. Sekalipun sisa pemberangusan, pojok masih memberikan nuansa dan warna khas jurnalisme Indonesia.***

DAFTAR RUJUKAN

- Abar, Akhmad Zaini. (1995). *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*. Yogyakarta: LKIS.
- (1997) "Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia" dalam *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan Bangsa*, Mahfud MD dkk. (ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Alwasilah, A. Chaedar. (1996). "Rekayasa Bahasa dan Perubahan Sosial Budaya". Makalah diskusi, FPBS IKIP Bandung.
- Aly, Bactiar. (1986). "Mencari Perspektif Baru Isi Surat Kabar Indonesia" dalam *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anwar, Khaidir. (1995). *Beberapa Aspek Sosio-Kultural Masalah Bahasa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Rosihan. (1991). *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Arpan, Floyd G. dan S. Rochady. (1970). *Wartawan Pembina Masyarakat*. Bandung: Binacipta.
- Bawa, I. Wayan (1996). "Perkembangan Ragam-Ragam Bahasa Indonesia" dalam *Bahasa dan sastra Indonesia*, Djajakusuma dan Nadeak (ed.). Bandung: HPBI dan Pustaka Wina.
- Brown, Gillian dan George Yule. (1996). *Discourse Analysis (Analisis Wacana)*, tejemahan I. Soekitno. Jakarta: Gramedia.
- Dahana, Radhar panca. (1996). "Kudeta Bahasa". *Republika*, 3 Juli 1996.
- Dahlan, M. Alwi. (1977). "Sikap Pejabat Terhadap Kritik". *Prisma* No. 10 Tahun IV.
- Dhakidae, Daniel. (1996) "Bahasa dan Kekuasaan: Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru" dalam *Bahasa dan Kekuasaan*, Latif dan Ibrahim (ed.) Bandung: Mizan.
- Faruk. (1997). "Kritik Terbuka Sebuah Imperatif Budaya" dalam *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan Bangsa*, Mahfud M.D dkk. 9ed.). Yogyakarta: UII Press.
- Hadi, Parni. (1997). "Bahasa Koran yang Diremehkan". *Republika*, 16 Maret 1997.
- Hill, David T. (1995). *The Press in News Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hooker, Virginia Matheson. (1996). "Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan Indonesia: Sorotan Terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru" dalam *Bahasa dan Kekuasaan*, Latif dan Ibrahim.
- Kleden, Ignas. (1978). "Eufimisme Bahasa, Konsensus Sosial, dan Kreativitas Kata". *Prisma*, Desember 1978. hal 67-72.
- Lewuk, Peter. (1995). *Kritik Filosofis atas Pembangunan, Beberapa Serpihan Pemikiran*. Jakarta: Fosko '66.
- Makah, Masmimar. (1977). "Poajok" Sebagai Penyalur Kritik". *Prisma* No. 10 Oktober 1977, Tahun VI.
- Mohamad, Gunawan. (1991) "Bahasa Jurnalistik Indonesia" dalam *Pengetahuan Dasar Jurnalistik*, Wibisono (ed.). Jakarta: Media Sejahtera.
- Naomi, Omi Intan. (1996). *Anjing Penjaga, Pers di Rumah Orde Baru*. Jakarta: Gorong-Gorong Budaya.
- Pabottinggi, Mochtar. (1993). "Bahasa, Politik, dan Ototentrisitas". *Republika*, 7 Desember 1993.